

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Jambi pada Desember 2024 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,46% (mtm). Secara bulanan perkembangan IHK bulanan tersebut lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat mengalami inflasi sebesar 0,21% (mtm). Realisasi tersebut juga terpantau sedikit lebih tinggi dibandingkan capaian nasional yang tercatat inflasi sebesar 0,44% (mtm). Secara tahunan, perkembangan IHK Provinsi Jambi tercatat sebesar 1,43% (yoy), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang inflasi sebesar 1,42% (mtm), namun terpantau lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang tercatat sebesar 1,57% (yoy). Secara bulanan, inflasi Provinsi Jambi diisumbangkan oleh Kota Jambi, Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kerinci yang masing-masing mengalami inflasi sebesar 0,41% (mtm), 0,30% (mtrm) dan 0,73% (mtm). Lebih lanjut, inflasi tahunan Provinsi Jambi didorong oleh ketiga Kabupaten/Kota Jambi sebesar 1,16% (yoy) lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya sebesar 0,75% (yoy), Kabupaten Bungo yang tercatat inflasi sebesar 2,04% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya sebesar 1,73% (yoy), serta Kabupaten Kerinci mengalami inflasi sebesar 2,07% (yoy), lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya sebesar 2,28% (yoy).

Perkembangan harga berbagai komoditas pada Desember 2024 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Provinsi Jambi di tiga kabupaten/kota IHK, pada Desember 2024 terjadi inflasi y-on-y sebesar 1,43 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 105,05 pada Desember 2023 menjadi 106,55 pada Desember 2024. Tingkat inflasi m-to-m sebesar 0,46 persen dan tingkat inflasi y-to-d sebesar 1,43 persen. Pada bulan Desember, inflasi y-on-y dan inflasi y-to-d akan memiliki angka yang sama.

Inflasi y-on-y di Provinsi Jambi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya delapan indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar 2,12 persen; kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 2,30 persen; kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 0,91 persen; kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,13 persen; kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya sebesar 3,79 persen; kelompok Pendidikan sebesar 1,43 persen; kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 1,99 persen; dan kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 4,77 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok Kesehatan sebesar 1,53 persen; kelompok Transportasi sebesar 0,61 persen; dan kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,81 persen.

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada Desember 2024, antara lain: daging ayam ras, emas perhiasan, minyak goreng, kopi bubuk, ikan nila, sigaret kretek mesin (SKM), jengkol, ikan serai, kontrak rumah, bawang putih, petai, pempek, rekreasi, tahu mentah, beras, sigaret kretek tangan (SKT), baju muslim wanita, sepeda motor, telur ayam ras, dan tarif kendaraan travel, gula pasir, biskuit, santan segar, bakso siap santap, kentang, bimbingan belajar, sigaret putih mesin (SPM), upah asisten rumah tangga, sewa rumah, mie, udang basah, ikan tongkol/ikan ambu-ambu, sekolah dasar, ikan lele, seragam sekolah anak, dan ongkos jahit. Sementara komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m pada Desember 2024, antara lain: cabai merah, ikan serai, beras, ikan nila, cabai rawit, minyak goreng, telur ayam ras, kangkung, ikan tongkol, ketimun,

bawang putih, bayam, jengkol, biskuit, santan segar, sawi putih, kelapa, kacang panjang, kembang kol, ikan gabus, buncis, ikan lele, ikan patin, dan kol putih/kubis. Pada Desember 2024, kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y, yaitu: kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar 0,66 persen; kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 0,15 persen; kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 0,12 persen; kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,01 persen; kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya sebesar 0,08 persen; kelompok Pendidikan sebesar 0,07 persen; kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 0,18 persen; dan kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,33 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran yang memberikan andil deflasi y-on-y, yaitu: kelompok Kesehatan sebesar 0,05 persen; kelompok Transportasi sebesar 0,08 persen; dan kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,04 persen.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Inflasi Provinsi Jambi pada Desember 2024 utamanya didorong oleh adanya kenaikan harga pada beberapa kelompok pengeluaran antara lain kelompok makanan, minuman dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 1,76% (mtm) dengan andil sebesar 0,55%, mencermati perkembangan inflasi terkini dan beberapa indikator harga, IHK Januari 2025 diperkirakan akan mengalami inflasi. Beberapa faktor risiko inflasi di antaranya masih relatif tingginya permintaan masyarakat pada beberapa momentum libur panjang Isra Mi'raj 1446 H dan Imlek 25 76 K; peningkatan harga komoditas pada disagregasi Administered Price seiring dengan tren peningkatan harga avtur dan BBM setiaptahunnya; serta adanya potensi peningkatan harga secara umum yang diindikasikan sebagai second round effect dari pemberlakuan kenaikan PPN objek PPnBM pada awal Tahun 2025 sesuai implementasi UU No.42/2009 dan PMK No. 131/2024 tentang pengenaan tarif 12% khusus untuk barang mewah dan adanya peningkatan UMP Jambi.

Merespon hal tersebut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus melakukan berbagai upaya dalam pengendalian inflasi sesuai dengan koridor 4K. upaya tersebut dilakukan ditengah kelonggaran yang diberikan Pemerintah Provinsi Jambi untuk dapat melakukan berbagai upaya intervensi baik dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jambi, sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan Rapat rutin mingguan Pengendalian Inflasi Daerah bersama Meneteri Dalam Negeri RI.
2. Pada tanggal 2 September 2024 telah dilaksanakan Audiensi Konsep Pengembangan Lahan Horti Abadi (LAHTIBA) yang bertempat di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi.
3. Pada tanggal 17 September 2024 telah dilaksanakan High Level Meeting (HLM)TPID Provinsi Jambi semester II Tahun 2024 bertempat swiis belhotel.
4. Pada tanggal 18 September 2024 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pemantapan Program Lahtiba TPID Provinsi Jambi bertempat di Ruang Rapat Dinas TPHP Provinsi Jambi.

Pada tanggal 10 Oktober 2024 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi

5.

Daerah, mengenai langkah kebijakan pengendalian inflasi dan mempersiapkan kegiatan GPM, dengan peserta Perangkat Daerah Provinsi Jambi dan Bupati/ Wali Kota se-Provinsi Jambi secara daring.

6. Penyaluran Beras CBP dan Beras SPHP oleh Bulog Kanwil Jambi yang telah direalisasikan pada bulan November 2024 masing-masing 1,82 juta ton, selain itu TPID Provinsi Jambi melalui Bulog Kanwil Jambi telah menyalurkan bantuan pangan tahap III sebagaimana arahan Bapanas.
7. Pelaksanaan Sidak Pasar pada 5 (lima) Pasar oleh Satgas Pangan Provinsi Jambi, TPID Kota Jambi, TPID Kota Sungai Penuh, TPID Kab. Muaro Jambi, TPID Kab. Sarolangun, TPID Kab. Tanjung Jabung Timur.
8. Pelaksanaan Operasi Pasar pada 10 Pasar oleh TPID Kab. Sarolangun, TPID Kab. Tebo, dan TPID Kab. Tanjung Jabung Timur.
9. Penyaluran Beras CBP dan Beras SPHP oleh Bulog Kanwil Jambi yang telah direalisasikan pada bulan Desember 2024 masing-masing 8,752 juta ton dan 2,89 juta ton, selain itu TPID Provinsi Jambi melalui Bulog Kanwil Jambi telah menyalurkan bantuan pangan tahap III sebagaimana arahan Bapanas.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Perlunya meningkatkan Peran aktif TPID Provinsi dalam pembinaan kelembagaan TPID Kab/Kota di Provinsi Jambi sangat strategis dalam mendukung pengendalian inflasi provinsi maupun nasional;

2. Pentingnya Pemerintah Daerah memperhatikan beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga dengan cukup signifikan karena berpotensi merugikan produsen seperti petani dan peternak, terutama pada daerah-daerah yang menjadi sentra produksi komoditas pangan.

3. Menugaskan Perangkat Daerah terkait untuk membantu petani mencari langkah antisipai sehingga produksi komoditas pertanian/pangan tetap dapat dilakukan.

4. Pada tanggal 18 September 2024 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pemantapan Program Lahtiba TPID Provinsi Jambi bertempat di Ruang Rapat Dinas TPHP Provinsi Jambi.

5. Pada tanggal 10 Oktober 2024 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, mengenai langkah kebijakan pengendalian inflasi dan mempersiapkan kegiatan GPM, dengan peserta Perangkat Daerah Provinsi Jambi dan Bupati/ Wali Kota se-Provinsi Jambi secara daring.

6. Penyaluran Beras CBP dan Beras SPHP oleh Bulog Kanwil Jambi yang telah direalisasikan pada bulan November 2024 masing-masing 1,82 juta ton, selain itu TPID Provinsi Jambi melalui Bulog Kanwil Jambi telah menyalurkan bantuan pangan tahap III sebagaimana arahan Bapanas.

7. Pelaksanaan Sidak Pasar pada 5 (lima) Pasar oleh Satgas Pangan Provinsi Jambi, TPID Kota Jambi, TPID Kota Sungai Penuh, TPID Kab. Muaro Jambi, TPID Kab. Sarolangun, TPID Kab. Tanjung Jabung Timur.

8. Operasi Pasar pada 10 Pasar oleh TPID Kab. Sarolangun, TPID Kab. Tebo, dan TPID Kab.

Tanjung Jabung Timur.

9. Penyaluran Beras CBP dan Beras SPHP oleh Bulog Kanwil Jambi yang telah direalisasikan pada bulan Desember 2024 masing-masing 8,752 juta ton dan 2,89 juta ton, selain itu TPID Provinsi Jambi melalui Bulog Kanwil Jambi telah menyalurkan bantuan pangan tahap III sebagaimana arahan Bapanas.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Perlunya meningkatkan Peran aktif TPID Provinsi dalam pembinaan kelembagaan TPID Kab/Kota di Provinsi Jambi sangat strategis dalam mendukung pengendalian inflasi provinsi maupun nasional;
2. Pentingnya Pemerintah Daerah memperhatikan beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga dengan cukup signifikan karena berpotensi merugikan produsen seperti petani dan peternak, terutama pada daerah-daerah yang menjadi sentra produksi komoditas pangan.
3. Menugaskan Perangkat Daerah terkait untuk membantu petani mencari langkah antisipasi sehingga produksi komoditas pertanian/pangan tetap dapat dilakukan.

Dalam jangka pendek :

1. Menyusun data neraca pangan Provinsi Jambi sebagai dasar pengambilan keputusan pemenuhan kebutuhan pangan di Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Provinsi Jambi bekerjasama dengan Dinas Perindag dan Bulog Provinsi Jambi dalam melaksanakan Operasi pasar dan Pasar Murah dalam rangka menjaga stabilitasi harga bahan pokok pada bulan Januari s.d Desember 2024.
3. Kerjasama Antar Daerah (KAD) antar kota/kabupaten di Provinsi Jambi atau antar provinsi sebagai salah satu upaya memenuhi ketersediaan bahan pangan strategis.
4. Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dapat memanfaatkan dan mengoptimalkan pos Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai perlindungan sosial untuk membantu masyarakat kurang mampu terdampak inflasi. APBD merupakan tulang punggung utama untuk menggerakkan ekonomi, sehingga APBD harus tersalurkan tepat waktu termasuk pemberian bantuan sosial dan dana insentif lainnya.
5. Meningkatkan sinergi Pengendalian inflasi melalui rapat koordinasi (Rakor) TPID berkala, serta meningkatkan sinergi dalam kerangka Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), untuk tahun 2024, telah dilaksanakan GNPIP bersamaan dengan Pekan Nasional Qris di Hotel Aston Kota Jambi, antara lain dengan menggiatkan gerakan pemberian modal bagi pengusaha/UMKM yang bergerak dibidang budidaya cabai, timun, bawang merah, sawi, kangkung, kol dan lain-lain juga pelaksanaan pasar murah dan operasi pasar (bekerjasama dengan Bank Indonesia).
6. Pemerintah kota/kabupaten perlu meningkatkan proses digitalisasi oleh Tim Percepatan dan

Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

7. Mengevaluasi Program Unggulan (output) Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi yang didukung oleh TPID Provinsi Jambi dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi sehingga secara efektif menjaga capaian inflasi pada level rendah dan stabil, tepat sasaran dalam menyelesaikan problem inflasi daerah serta berada pada track yang sesuai dalam upaya Pengendalian Inflasi daerah.

8. TPID Provinsi Jambi dan instansi terkait terus mengadakan rapat koordinasi pengendalian inflasi setiap pekan pada hari senin yang bertujuan untuk mengevaluasi komoditas yang menyumbang kenaikan inflasi dan mencari solusi terbaik.

Dalam jangka menengah/panjang :

1. Optimalisasi Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah dalam Pengendalian Inflasi :

- Monitoring dan evaluasi dan Pengawasan implementasi KAD agar tidak hanya berhenti dengan penandatanganan MoU dan PKS.
- Mendorong Fasilitasi Kerjasama secara Business to Business (B2B), tidak hanya Government to Government (G2G)
- Mendorong peran BUMD Pangan dalam Pelaksanaan KAD, baik untuk pemenuhan kebutuhan di daerah maupun pendistribusian ke daerah lain.

2. Kebijakan *extra effort* masih dilanjutkan sampai akhir tahun 2024 guna menekan laju inflasi kembali ke rentang target sasaran;

3. Tersedianya data merupakan hal yang strategis guna mendukung kebijakan pengendalian harga pangan strategis dalam rangka penguatan ketahanan pangan nasional sehingga perlu sinergi data dan informasi pangan antar lembaga dan/atau daerah yang mencakup harga, pasokan, dan jadwal panen;

4. Pemanfaatan data produksi pertanian sebagai identifikasi potensi KAD karena mayoritas produksi komoditas pangan masih terfokus di wilayah Indonesia bagian Barat terutama Pulau Jawa, sehingga ketersediaan pasokan antar waktu dan antar wilayah masih menjadi tantangan utama dalam stabilisasi harga pangan;

5. Melaksanakan aktifitas sesuai dengan peta pangan strategis yang mengindikasikan posisi surplus dan defisit Provinsi Jambi, berdasarkan pada daftar komoditas penyumbang utama inflasi Provinsi Jambi.

6. Mengimplementasikan Peta Jalan (ROADMAP) Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2024, untuk menjaga Inflasi di daerah;

7. Mendorong peningkatan produksi pangan lokal serta mendorong konsumsi produk pangan lokal;

8. Melakukan edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan tentang konsumsi pangan olahan dan pangan alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk pangan utama; dan

9. Melakukan manajemen persediaan untuk menghadapi lonjakan harga komoditas hortikultura dengan penyediaan mesin pengawet atau *cold storage*.